**Strategi “SIAP Pajak” untuk Pembangunan Sulsel**

****

1. Pendahuluan

Apabila bertanya kepada masyarakat umum mengenai pajak, mungkin banyak dari mereka yang belum sepenuhnya mengerti dan memahami makna dari pajak. Dari sudut pandang pegawai dan pengusaha, pajak bagai merupakan sebuah momok yang menghantui mereka dari waktu ke waktu. Dari sudut pandang pelajar dan mahasiswa yang masih menuntut ilmu dan belum memiliki pekerjaan, mungkin belum terlalu menyadari serius pentingnya membayar pajak, sesederhana bahwa “golongan” ini belum dikenai wajib pajak. Terlebih, penciptaan opini di masyarakat yang beredar selama ini seolah terbentuk dari pemberitaan media yang berlebihan, bahwa membayar pajak hanyalah perbuatan sia-sia yang akan menambah sulit perekonomian masyarakat. Namun sebagai penduduk Indonesia yang baik dan taat hukum, ada baiknya kita mengetahui dengan lebih baik peran pajak dalam pembangunan negara dan daerah, khususnya Sulawesi Selatan. Sehingga kita dapat menjadi masyarakat yang lepas dari pikiran negatif semata dan lebih berupaya untuk mengetahui lebih lanjut dan mencari solusi; dan membantu menyadarkan masyarakat lainnya mengenai pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan literatur, sejarah perpajakan sejak jaman kerajaan membuktikan kalau pungutan pajak selalu sering memberatkan rakyat. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) dari rakyat untuk raja atau penguasa, namun sifatnya dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan. Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.  Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Karena sifatnya yang dapat memaksa dan merupakan ‘kontribusi wajib’ setiap warga negaranya, pajak menjadi salah satu kebijakan yang tidak disukai masayarakat Indonesia. Bahkan ada persepsi orang bijak yang mengatakan: *“ada dua hal yang tak dapat dihindari seorang manusia, yaitu kematian dan pajak*.” Sebegitu besarnya momok pajak, yang membuat orang melupakan pajak adalah sumber penghasilan terbesar bagi Negara. Tanpanya, ‘kehidupan negara’ tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena penerimaan dari sektor pajak mengisi lebih dari 75% penghasilan Negara.

Pada esai saya ini, saya akan membahas tentang dinamika pajak dan pembangunan daerah yang ada di daerah kita, Sulawesi Selatan. Semoga esai ini dapat memberikan sedikit pencerahan, gambaran kenyataan, dan pengetahuan bagi seluruh pihak terkhusus warga negara Indonesia, terkhusus lagi penduduk provinisi Sulawesi Selatan yang membacanya.

1. Pembahasan
2. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang daengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tiap daerah diberikan hak dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Dalam pengaturan anggaran inilah, maka tentunya daerah memerlukan biaya yang besar dalam membiaya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

1. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak Rokok
6. Fungsi Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk modal pembangunan. Oleh karena itu pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pajak dapat membiayai pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, jaminan kesehatan, dan sebagainya.

Fungsi pajak daerah juga adalah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini bisa digunakan untuk pembangunan, anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagainya. Selain itu pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan insidental, seperti pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya. Pada akhirnya, pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan.

1. Dinamika Pajak Daerah dan Pembangunan Daerah Sulsel

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika adalah *“*gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di tata hidup masyarakat yang bersangkutan*,”* atau “gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan”. Berdasarkan arti katanya saja, dinamika berhubungan dengan “pergerakan”. Pergerakan dalam pajak daerah ini tentunya diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas manfaat pajak bagi daerah.

Namun, merupakan suatu hal yang lazim bahwa dalam setiap dinamika, apalagi yang berhubungan dengan pembangunan, mungkin ada hambatan atau masalah yang muncul. Ada masalah umum yang dimiliki tiap daerah dalam sektor pajak, yaitu :

* Penerimaan pajak belum intensif

Di beberapa daerah, masih terdapat banyak potensi pajak yang belum tergali. Hal tersebut mungkin disebabkan karena belum efektifnya pemerintah daerah di dalam penarikan pajak.

* Penyaluran pajak belum optimal

Tujuan pajak adalah untuk keperluan pembangunan. Namun, di beberapa daerah masih didapati pajak lebih banyak digunakan untuk keperluan biaya rutin seperti gaji dan fasilitas pegawai, dan sebagainya. Tentu saja hal ini tidak diharapkan karena pajak seharusnya lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan elemen yang berhubungan dengan masyarakat.

* Kesadaran membayar pajak rendah

Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah. Selain itu, juga belum optimalnya penyaluran pajak sehingga masyarakat kurang bisa merasakan manfaat pajak bagi mereka.

Bagaimana dengan Sulawesi Selatan sendiri?

Secara administratif, Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 20 kabupaten dan 4 kota dengan Makassar sebagai ibukota provinsi. Dengan sekian banyak potensi di bidang perikanan, perkebunan, hutan, teh, mineral, dan lain lain, seharusnya pengelolaan sektor pajak dari hasil bumi yang adekuat akan menghasilkan modal untuk pembangunan daerah yang optimal.

Sebagai contoh, saat ini sedang dicanangkan pembangunan infrastruktur daerah berupa rel kereta api Trans Sulawesi. Selain itu, pembangunan kawasan Central Point of Indonesia (CPI) yang diharapkan menjadi bagian dari perluasan upaya maksimal untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai sentral perdagangan dan distribusi barang. Tahun ini juga mulai dilakukan perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, pembenahan pelabuhan Makassar, dan lain sebagainya.(<http://makassar.antaranews.com/berita/53018/sulsel-dorong-percepatan-pembangunan-infrastruktur>) Semua pembangunan infrastruktur ini tentunya ditujukan untuk kelangsungan hidup rakyat, yaitu menunjang sarana transportasi dan kemajuan suatu daerah. Maka masyarakat harus memahami bahwa pajak sebagai penyumbang pembangunan infrastruktur daerah terbesar pajak adalah isu yang sangat penting untuk dipahami.

1. Gerakan “SIAP Pajak”

Dalam menghadapi masalah di atas, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam menyikapi masalah ini. Tidak semua golongan masyarakat memahami pajak dan fungsinya, maka dari itu pendidikan tentang pajak harus ditanamkan secara dini. Berdasarkan keyakinan ini maka saya membuat pedoman, dan gerakan **“SIAP Pajak”.** SIAP merupakan kependekan dari empat sikap yang harus diimani dalam mengolah pajak untuk bangsa, yaitu “***Socialization, Integrity, Action, Planning***”.

1. ***Socialization***

Sosialisasi merupakan kata yang vital dalam menjunjung kesuksesan bayar pajak. Sosialiasi pajak di masyarakat harus meliputi peran pajak bagi pembangunan daerah. Pajak bukan hanya milik pekerja dan pengusaha. Pentingnya pajak untuk pembangunan harus merambah seluruh golongan masyarakat, dari berbagai generasi untuk mencapai *mindset* yang benar tentang pajak.

Salah satu proses sosialisasi lintas generasi telah terlihat dengan diselenggarakannya ajang pemilihan Duta Pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Kaum muda yang terlibat menunjukkan bahwa kaum muda saat ini menjadi penentu kelangsungan hidup bernegara khususnya dalam memahami pajak. Adalah tepat kalau sosialisasi perpajakan sebaiknya dilakukan oleh seorang yang independen, berkepribadian yang baik dan berpenampilan menarik, komunikatif, cerdas, dan sadar akan arti penting pajak. Kaum ini tentunya diharapkan mampu membantu sosialisasi dan realisasi program pemerintah.

Sosialiasi berikutnya di kalangan anak-anak dapat dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti dongeng, drama dan pembuatan kartun mengenai pajak.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel sendiri contohnya, telah melakukan sosialisasi optimalisasi pemasangan Stiker tanda pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan roda empat untuk rutin membayar pajaknya. Pemasangan Stiker dapat menjadi media sosialisasi menarik bagi masyarakat. Inovasi ini dapat menambah tingkat kepatuhan ‎masyarakat dalam menambah pendapatan daerah disektor pajak kendaraan roda empat. (<http://makassar.tribunnews.com/2013/10/23/dispenda-sulsel-sosialisasi-stiker-pajak-kendaraan>)

Sosialisasi yang lekat dalam masyarakat lainnya juga telah dicapai dengan SMS Info Pajak Kendaraan dan informasi pajak melalui media sosial Twitter. Sekarang pun sosialisasi harus lebih ditingkatkan, untuk lebih memperkenalkan bahwa masyarakat pun bisa membayar pajak dengan sistem e-*payment*.

1. ***Integrity***

Ungkapan yang menurut saya sangat inspirasional dari Dee Hock, seorang ekonom dan ahli manajemen: *Tanpa integritas , motivasi menjadi berbahaya; tanpa motivasi, kapasitas menjadi tak berdaya; tanpa kapasitas, pemahaman menjadi terbatas; tanpa pemahaman pengetahuan tidak ada artinya; tanpa pengetahuan, pengalaman menjadi buta.*

Seorang yang memiliki integritas bisa menjalankan sesuatu dengan baik, memperbaiki kesalahan dan mampu mengubah dirinya. Integritas merupakan awal dari sebuah janji dan komitmen dalam membangun bisnis dan pelayanan. Tanpa integritas maka orang akan malas melakukan apa yang menjadi tugasnya karena mereka melakukan semua hal karena terpaksa, bukan keluar dari dalam hati nurani mereka. Integritas meliputi hal yang tidak kalah penting lainnya: kejujuran. Kejujuran dalam bekerja sesuai porsi masing-masing, kejujuran dalam membayar pajak, kejujuran dalam mendatakan usaha, harta, dan hasil daerah oleh pegawai dan pengusaha yang tersebar di Sulawesi Selatan. Dalam dunia kerja, integritas dalam bekerja merupakan hal yang mutlak dimiliki individu untuk mencapai tujuan organisasi, kelembagaan, atau perusahaan. Maka integritas pun wajib dimiliki pegawai pajak, pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya dalam mengolah pajak untuk pembangunan.

1. ***Act***

Aksi adalah implementasi dari integritas. Aksi adalah turun campur tangan langsung dalam pengawasan dan sosialisasi pajak. Teori dan perencanaan dapat dibuat, namun aksi adalah salah satu elemen terpenting.

Aksi berhubungan erat dengan sosialisasi. Aksi termasuk mendatangi langsung masyarakat dan memberikan penyuluhan mengenai pajak. Aksi bisa dilakukan dengan membagikan pamflet, atau menjelaskan langsung rentetan langkah membayar pajak kepada masyarakat (contohnya dalam hal ini dapat dilakukan oleh Duta Pajak). Aksi dapat dilakukan dengan memberi tur dan mengajarkan cara membayar pajak di Dinas Pendapatan Daerah kepada siswa sekolah.

Lembaga pengawas seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian atau lembaga pengawas lain yang mempunyai wewenang untuk menindak oknum-oknum yang dianggap merugikan negara pun bertanggung jawab dalam melaksanakan aksi. Lembaga independen seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga dapat ikut ambil bagian dalam melakukan fungsi pengawasan. Disinilah peran pemuda-pemuda khususnya para mahasiswa yang telah dibekali ilmu pajak sangat diperlukan.

1. *Planning*

Perencanaan yang matang dibutuhkan untuk menunjang sosialiasi, integritas dan aksi. Tanpa perencanaan kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Harus ada kesinambungan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Untuk Sulawesi Selatan sendiri, penting adanya perencanan mengenai program-program yang akan dilakukan guna meningkatkan mutu pajak. Program kerja yang baik niscaya akan memberikan hasil yang baik pula. Berhubung pelayanan pajak tersebar di kota dan kabupaten, maka tanpa program kerja yang rapi maka kemungkinan untuk terbengkalai akan sangat besar.

Program kerja yang telah diberikan pemerintah yang terbukti berguna perlu dipertahankan. Contohnya Dinas Pendapatan Daerah dalam program kerja Gerai Samsat yang tersebar di berbagai titik di kota Makassar dan daerah, salah satunya Samsat Luwu. Layanan Samsat Keliling yaitu Mobil Samsat Keliling yang disiapkan untuk mempermudah pelayanan wajib pajak di kabupaten/kota. Ada juga program *drive thru* dan *payment point*. Semua ini adalah perencanaan yang sangat baik dalam menunjang kemudahan masyarakat dalam membayar pajak dan sebaiknya dipertahankan dari tahun ke tahun atau apabila telah “lumpuh”, maka sebaiknya dibangkitkan kembali.

Salah satu contoh lainnya juga adalah Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulsel dan Dinas Pendapatan Daerah yang dalam mewajibkan alokasi bagi hasil penerimaan pajak rokok agar diperuntukkan untuk dana kesehatan sebanyak minimal 50 persen. Mulai penundaan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok sebesar 10 persen sampai pemotongan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok sebesar 10 persen. Adapun alokasi kesehatan dimaksud yakni bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu terutama bagi mereka yang menderita sakit akibat rokok, dan pembangunan sarana kesehatan yang dibutuhkan (<http://ekbis.sindonews.com/read/804629/34/50-pajak-rokok-sulsel-harus-untuk-kesehatan>). Saya pribadi sebagai mahasiswa kedokteran, menganggap bahwa ini adalah langkah yang sangat tepat dan berfungsi ganda dalam manfaatnya untuk peningkatan mutu kesehatan Sulawesi Selatan.

Kesimpulan

Pajak berkaitan erat dengan pembangunan daerah. Gerakan “**SIAP Pajak**” berbasis empat elemen terpenting yang saya usulkan, hanyalah bisa terlaksana dengan baik melalui kerjasama yang terjalin di antara seluruh lapisan masyarakat, baik dari kaum pekerja maupun pelajar/mahasiswa sebagai *agent of change*. Sayang kalau ada orang-orang yang berprinsip, “Bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan” jadi harus mengeluh dengan “ribet”nya urusan di balik pembayaran pajak. Dan saya yakin orang-orang seperti itu masih banyak di luar sana. Orang-orang yang rajin dan taat membayar pajak karena itu merupakan bagian dari ibadahnya. Bersama-sama berusaha untuk menjadi pembayar pajak dan petugas pajak yang baik, saya yakini sebagai landasan terbaik untuk pembangunan di Sulawesi Selatan agar menjadi provinisi yang terdepan di Indonesia.